

Mengukur Kemandirian Fiskal Daerah: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Dalam Era Desentralisasi di Provinsi Kalimantan Barat

Rosan Fariyanda ^{1*}, Ayu Umyana ², Muhsin ³

^{1*,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia.

Email: b1031221023@student.untan.ac.id ^{1*}, ayuumyana@ekonomi.untan.ac.id ², muhsin_anis@yahoo.co.in ³

Histori Artikel:

Dikirim 21 Mei 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 Juli 2025; Diterima 15 September 2025; Diterbitkan 1 Oktober 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Fariyanda, R., Umyana, A., & Muhsin, M. (2025). Mengukur Kemandirian Fiskal Daerah: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Dalam Era Desentralisasi di Provinsi Kalimantan Barat. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(5), 4743-4754. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i5.4320>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2019 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda. Sampel penelitian terdiri dari 14 kabupaten/kota yang dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan ketersediaan data keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan DBH berpengaruh positif namun tidak signifikan. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,612 menunjukkan bahwa PAD dan DBH secara bersama-sama mampu menjelaskan 61,2% variasi dalam tingkat kemandirian fiskal daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kemandirian fiskal daerah lebih dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam menggali potensi PAD daripada ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat seperti DBH. Hasil ini menyarankan bahwa pemerintah daerah perlu memprioritaskan kebijakan yang mendorong peningkatan PAD melalui penguatan sektor ekonomi lokal, perbaikan sistem pemungutan pajak, serta peningkatan kapasitas kelembagaan fiskal daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya optimalisasi PAD perlu menjadi fokus utama dalam strategi fiskal daerah guna memperkuat otonomi keuangan dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Dana Bagi Hasil; Kemandirian Fiskal; Desentralisasi Fiskal; Kalimantan Barat.

Abstract

This study aims to examine the effect of Local Own-Source Revenue (PAD) and Revenue Sharing Funds (DBH) on the level of regional fiscal independence in West Kalimantan Province over the period 2019 to 2023. A quantitative approach was employed using multiple linear regression analysis. The research sample consisted of 14 regencies and cities selected through purposive sampling based on the availability of regional financial data. The results indicate that PAD has a positive and statistically significant effect on fiscal independence, whereas DBH, despite showing a positive relationship, does not demonstrate statistical significance. The coefficient of determination (R^2) of 0.612 reveals that PAD and DBH collectively explain 61.2% of the variation in fiscal independence across the regions studied. These findings suggest that regional fiscal autonomy is more strongly driven by the capacity of local governments to mobilize their own-source revenues than by reliance on central government transfers such as DBH. The results underscore the need for local governments to prioritize policies that enhance PAD through the development of local economic sectors, reform of tax collection systems, and sustained institutional capacity building in fiscal management. Therefore, optimizing PAD should be a central focus of regional fiscal strategies to strengthen financial autonomy and support sustainable regional development.

Keyword: Local Own-Source Revenue; Revenue Sharing Fund; Fiscal Independence; Fiscal Decentralization; West Kalimantan.

1. Pendahuluan

Desentralisasi fiskal merupakan strategi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satu elemen penting dalam mendukung keberhasilan desentralisasi adalah tercapainya kemandirian fiskal di tingkat daerah. Kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri pengeluarannya melalui optimalisasi pendapatan asli tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Mardiasmo, 2018). Dalam konteks ini, daerah dituntut tidak hanya menjadi pengguna anggaran tetapi juga sebagai penghasil pendapatan yang produktif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat masih tergolong tinggi, khususnya di wilayah luar Jawa. Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI (2023), lebih dari 70% pendapatan daerah di Provinsi Kalimantan Barat masih bergantung pada dana transfer pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketergantungan ini menandakan lemahnya kapasitas fiskal daerah dan menimbulkan risiko fiskal apabila terjadi perubahan kebijakan transfer dari pusat. Dengan kata lain, desentralisasi fiskal yang ideal belum sepenuhnya tercapai karena sebagian besar daerah belum memiliki kemandirian dalam membiayai kebutuhan fiskalnya (Pusat Kajian Anggaran DPR RI, 2022). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama untuk mengukur kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal. Komponen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Meningkatnya PAD menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai belanja publik, mengurangi ketergantungan terhadap pusat serta memperkuat otonomi daerah (Adisasmita, 2017). Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan PAD melalui penguatan sektor-sektor ekonomi lokal sangat penting dalam upaya mewujudkan kemandirian fiskal. Di sisi lain, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan komponen transfer ke daerah yang berasal dari pendapatan pusat, seperti pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi salah satu sumber utama penerimaan daerah, terutama di wilayah yang kaya sumber daya alam seperti Kalimantan Barat. Menurut DJPK (2023), DBH untuk Kalimantan Barat tahun 2022 mencapai Rp1,89 triliun atau sekitar 19,2% dari total pendapatan daerah. Walaupun tujuannya adalah meningkatkan kapasitas fiskal daerah, Dana Bagi Hasil sering kali tidak mendorong kemandirian karena bersifat pasif dan tergantung pada kebijakan pusat serta fluktuasi penerimaan negara (Yustika, 2021).

Fenomena yang menarik adalah bahwa tingginya nilai PAD belum tentu berbanding lurus dengan tingkat kemandirian fiskal. Sebagai contoh, Kota Pontianak yang mencatat PAD sebesar Rp386 miliar pada tahun 2022, hanya memiliki tingkat kemandirian fiskal sebesar 36,4%. Sementara itu, Kabupaten Kubu Raya memperoleh PAD sebesar Rp189 miliar, tetapi tingkat kemandiriannya hanya 25,7% (Badan Pusat Statistik, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pendapatan daerah meningkat, belanja daerah juga meningkat dan sebagian besar masih ditopang oleh transfer pusat. Selain itu, struktur PAD yang kurang variatif dan ketergantungan pada sektor tertentu menjadi faktor lain yang menghambat pencapaian kemandirian fiskal (Kurniawan & Permata, 2022). Situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap tingkat kemandirian fiskal di daerah, khususnya di Kalimantan Barat. Evaluasi tersebut penting untuk memahami apakah peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil benar-benar berkontribusi terhadap kemandirian atau justru menciptakan ilusi kemandirian tanpa kinerja fiskal yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kebijakan fiskal daerah dan mendorong tata kelola keuangan public yang lebih mandiri dan bertanggung jawab (Nasution, 2020). Berdasarkan penelitian terdahulu, banyak penelitian yang mengangkat topik penelitian terkait pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Mayoritas penelitian terdahulu menggunakan kedua variabel secara utuh sehingga tidak dapat dipastikan komponen mana yang berpengaruh. Selain itu, masih jarang ditemukan penelitian yang menggunakan wilayah Kalimantan Barat sebagai tempat penelitian khususnya pada topik ini. Pada penelitian ini akan meneliti terkait pengaruh PAD dan dana bagi hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, khususnya dengan cakupan wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat

secara keseluruhan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu di bidang keuangan daerah, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian fiskal dalam konteks desentralisasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan kebijakan pengelolaan PAD dan distribusi DBH secara lebih efektif, khususnya untuk daerah-daerah di Kalimantan Barat.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal menjelaskan proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, termasuk pengelolaan pendapatan dan pengeluaran daerah. Teori ini menekankan bahwa daerah diberikan keleluasaan dalam mengatur sumber daya fiskalnya demi mendorong efisiensi, efektivitas pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal (Oates, 1972). Desentralisasi fiskal mencakup dua aspek utama, yaitu:

- 1) Desentralisasi Pendapatan (*Revenue Decentralization*): Kemampuan daerah untuk mengumpulkan pendapatan, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 2) Desentralisasi Pengeluaran (*Expenditure Decentralization*): Kewenangan dalam mengelola belanja daerah

Jika dikaji melalui teori desentralisasi fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi komponen penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonominya sendiri, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah transfer dari pusat yang diberikan sebagai bentuk keadilan fiskal. Keduanya berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian keuangan karena semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH), semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan dari pusat. Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Misalnya, penelitian oleh Sari dan Setiawan (2019) menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara positif berkontribusi terhadap tingkat kemandirian fiskal di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, Putri dan Wahyudi (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang tinggi secara signifikan mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat sehingga memperkuat otonomi keuangan. Studi lain oleh Hidayat dan Prasetyo (2020) mengungkapkan bahwa daerah dengan kemampuan PAD yang kuat cenderung memiliki kapasitas lebih baik dalam merancang dan mengimplementasikan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

2.2 Teori Ketergantungan Fiskal

Teori ketergantungan fiskal (*fiscal dependency theory*) menjelaskan bagaimana suatu daerah tidak mampu secara mandiri membiayai kebutuhan fiskalnya dan bergantung secara signifikan pada transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Bird dan Smart (2002) mengemukakan bahwa ketergantungan fiskal muncul akibat minimnya kapasitas daerah dalam menghasilkan pendapatan asli serta lemahnya sistem pengelolaan keuangan lokal. Ketergantungan fiskal menyebabkan kejadian sebagai berikut:

- 1) Rendahnya inovasi dan produktivitas fiskal daerah
- 2) Lemahnya akuntabilitas publik karena pengeluaran tidak sepenuhnya bersumber dari pendapatan sendiri
- 3) Meningkatnya risiko moral hazard karena daerah cenderung pasif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

RESEARCH ARTICLE

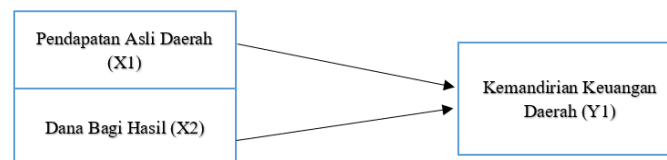
Dalam konteks teori ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah dan ketergantungan pada Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan lemahnya kemandirian fiskal. Meskipun Dana Bagi Hasil dapat membantu keuangan daerah, ketergantungan yang tinggi terhadapnya dapat memunculkan inefisiensi dan menurunkan insentif daerah untuk menggali potensi pendapatan lokal. Oleh karena itu, kemandirian keuangan daerah akan lebih kuat jika Pendapatan Asli Daerah meningkat dan ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil dapat dikendalikan. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa hubungan antara Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian fiskal bersifat bertentangan. Studi oleh Ritonga dan Alam (2017) mengungkapkan bahwa meskipun Dana Bagi Hasil memberikan kontribusi positif terhadap kapasitas fiskal daerah, ketergantungan yang berlebihan terhadap Dana Bagi Hasil justru menurunkan inisiatif daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator utama potensi ekonomi lokal. Semakin besar kemampuan daerah untuk membiayai pengeluarannya tanpa tergantung pada pusat. Ini menunjukkan bahwa daerah yang mampu menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal akan lebih mandiri secara fiskal (Oates, 1972). Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Kristina et.al., 2021), (Setiawan et.al., 2021), (Darmawati & Jafar, 2023), (Rahmanudin, 2022), (Rosidan, 2021). Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: H1= Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

2.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dana Bagi Hasil merupakan salah satu bentuk transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Meskipun, Dana Bagi Hasil dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah, ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer ini dapat mengindikasikan rendahnya kemandirian keuangan daerah (Bird & Smart, 2002). Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Verawaty et.al., 2017), (Handayani & Erinos, 2020), (Nurhasanah & Maria, 2017), (Amalia & Haryanto, 2019), (Darmawati, A., & Jafar, A. 2024). Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: H2= Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan sebab-akibat antara variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap variabel dependen yaitu Kemandirian Keuangan Daerah. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda untuk mengetahui pengaruh simultan maupun parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen (Abdullah, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2019–2023. Teknik pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu daerah yang memiliki data keuangan lengkap (LKPD dan APBD) selama periode observasi. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak 14 kabupaten/kota yang memenuhi syarat, yaitu memiliki data keuangan daerah (LKPD dan APBD) yang lengkap dan

RESEARCH ARTICLE

konsisten selama lima tahun berturut-turut (2019–2023). Pemilihan ini bertujuan untuk memastikan validitas data dalam pengujian model secara longitudinal dan menghindari bias akibat ketidakteraturan atau kekosongan data. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan mengakses data resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP), Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen keuangan daerah seperti Laporan Realisasi APBD dan LKPD. Proses verifikasi silang dilakukan dengan mencocokkan data dari berbagai sumber resmi dan publikasi daerah untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data yang digunakan dalam analisis.

Kemandirian keuangan daerah mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dalam konteks ini, pengukuran difokuskan pada perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah, tidak termasuk unsur pinjaman karena secara empiris data pinjaman daerah pada periode observasi cenderung tidak signifikan.

Rumus Rasio Kemandirian Fiskal:

$$\text{Kemandirian Fiskal} = (\text{Pendapatan Asli Daerah} / \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$$

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, PAD terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah (misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran)
- 2) Retribusi Daerah (seperti retribusi pelayanan kesehatan, parkir, pasar)
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (misalnya laba BUMD)
- 4) Lain-lain PAD yang Sah (bunga bank, pendapatan dari denda, dan penjualan aset)

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 (18) menyatakan pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam menghitung rasio pendapatan asli daerah menurut Marizka (2013) sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dana bagi hasil merupakan bagian dari dana perimbangan yang penerimannya berdasarkan dari potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial serta menjadi salah satu dasar pemerintahan dalam mendapatkan dana pembangunan daerah dan memenuhi belanja daerah yang bukan bersumber dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Formula untuk rasio dana bagi hasil menurut Marizka (2013) sebagai berikut:

$$\text{Dana Bagi Hasil} = \frac{\text{Dana Bagi Hasil}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mencakup beberapa tahapan untuk memperoleh hasil yang optimal. Pertama, dilakukan analisis statistik deskriptif guna memberikan gambaran umum mengenai data penelitian, seperti nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang diteliti. Analisis ini bertujuan untuk memahami karakteristik dasar dari data sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji normalitas dilakukan dengan Kolmogorov–Smirnov, sedangkan multikolinearitas diuji melalui nilai Tolerance dan VIF. Untuk heteroskedastisitas, digunakan uji Glejser, serta dilakukan pula uji White sebagai konfirmasi tambahan untuk mendeteksi bentuk heteroskedastisitas yang lebih kompleks. Sementara itu, uji autokorelasi dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson untuk mengidentifikasi kemungkinan korelasi serial antar residual dalam model regresi. Nilai Durbin-Watson yang mendekati angka 2 menunjukkan bahwa residual

RESEARCH ARTICLE

tidak saling berkorelasi. Analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Persamaan umum dalam model regresi tersebut dirumuskan sebagai:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kemandirian Keuangan Daerah

X₁ = PAD

X₂ = DBH

β₀ = Konstanta

β₁, β₂ = Koefisien regresi

ε = error term

Untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, digunakan uji t guna mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, digunakan koefisien determinasi (R²) untuk mengukur seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil dalam menjelaskan variasi kemandirian keuangan daerah. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat menyajikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hubungan antarvariabel yang diteliti.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Penelitian ini dilakukan pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari: Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Mempawah, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Ketapang, Kayong Utara, dan Kubu Raya. Daerah-daerah ini dipilih berdasarkan ketersediaan data laporan keuangan daerah (LKPD) dan data APBD selama periode 2019–2023. Secara umum, Kota Pontianak memiliki proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi, disusul oleh Kota Singkawang dan Kabupaten Ketapang. Sementara itu, Kabupaten Melawi dan Sintang menunjukkan kinerja fiskal yang lebih rendah. Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai bagian dari transfer pusat menjadi salah satu komponen utama penerimaan daerah, khususnya bagi daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah seperti Kapuas Hulu dan Ketapang. Hasil Statistik Deskriptif digunakan untuk melihat gambaran umum masing-masing variabel. Hasil ringkasan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Kemandirian Fiskal	0.21	0.71	0.38	0.13
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0.08	0.52	0.21	0.10
Dana Bagi Hasil (DBH)	0.10	0.38	0.19	0.06

Variabel Kemandirian Fiskal memiliki nilai rata-rata sebesar 0,38, Nilai maksimum 0,71 sedangkan minimumnya 0,21 dan nilai standar deviasi sebesar 0,13. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,21. Nilai maksimum sebesar 0,52 sedangkan minimumnya 0,08. Nilai standar deviasi sebesar 0,10. Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,19. Nilai maksimum 0,38 sedangkan minimumnya 0,10. Nilai standar deviasinya sebesar 0,06. Hasil pengujian asumsi klasik mengindikasikan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari indikasi multikolinearitas. Nilai *Tolerance* seluruh variabel prediktor berada di atas batas kritis 0,10. Sementara nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) tidak melebihi angka 10 yang mengonfirmasi tidak adanya multikolinearitas. Pada

RESEARCH ARTICLE

pengujian. Hal ini membuktikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat asumsi klasik untuk analisis statistic lanjutan.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Uji	Nilai Signifikansi	Kesimpulan
Kolmogorov-Smirnov	0.084	Data berdistribusi normal

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal. Uji ini penting untuk memenuhi asumsi klasik dalam regresi linear. Dalam penelitian ini digunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov* yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,084. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah pelanggaran terhadap asumsi normalitas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
PAD	0.751	1.332	Tidak terjadi multikolinearitas
DBH	0.751	1.332	Tidak terjadi multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk memastikan tidak terdapat hubungan linier yang tinggi antar variabel independen. Multikolinearitas dapat menyebabkan interpretasi koefisien regresi menjadi bias. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* untuk PAD dan DBH adalah 0.751, dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) adalah 1.332. Karena nilai *Tolerance* > 0.1 dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara PAD dan DBH. Artinya, variabel-variabel independen dalam model regresi ini bebas dari hubungan linier yang kuat.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig. (p-value)	Kesimpulan
PAD	0.213	Tidak terjadi heteroskedastisitas
DBH	0.109	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat varian residual yang tidak konstan. Dalam penelitian ini digunakan uji Glejser. Hasil menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel PAD adalah 0,213 dan DBH adalah 0,109 yang keduanya lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Artinya, varian residual bersifat konstan atau homoskedastis dan dapat dikatakan reliabel.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson

Statistik	Nilai	Interpretasi
Durbin-Watson	1.912	Tidak terjadi autokorelasi (mendekati 2)

Nilai Durbin-Watson sebesar 1.912 mendekati angka 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi ini. Hal ini memenuhi salah satu asumsi penting dalam regresi linear klasik, yaitu bahwa residual tidak saling berkorelasi.

Tabel 6. Hasil Uji White

Variabel	Nilai p-value	Kesimpulan
WhiteTest	0.293	Tidak terjadi heteroskedastisitas (p > 0,05)

RESEARCH ARTICLE

Uji White dilakukan untuk memastikan bahwa model tidak mengalami heteroskedastisitas dalam bentuk kompleks (non-linear atau polinomial). Hasil menunjukkan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0.293, lebih besar dari 0.05. Ini berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, sehingga model regresi memenuhi asumsi klasik secara menyeluruh.

Tabel 7. Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi (β)	t-hitung	Sig. (p-value)	Keterangan
Konstanta (α)	0.102	-	-	-
PAD (X1)	0.567	3.811	0.001	Signifikan
DBH (X2)	0.213	1.761	0.089	Tidak Signifikan

Model regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil regresi menghasilkan persamaan:

$$Y = 0.102 + 0.567X_1 + 0.213X_2 + \epsilon$$

Koefisien PAD (0,567) signifikan pada $\alpha = 0.05$ (p-value 0.001), menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal. Artinya, setiap peningkatan PAD sebesar 1 satuan akan meningkatkan kemandirian fiskal sebesar 0.567 satuan, ceteris paribus. Koefisien DBH (0,213) memiliki p-value sebesar 0.089 (> 0.05), sehingga tidak signifikan secara statistik, meskipun arah pengaruhnya positif. Namun demikian, dengan nilai p sebesar 0.089, DBH dapat dikategorikan sebagai hampir signifikan pada tingkat signifikansi 10%, atau dikenal sebagai *marginally significant*. Ini mengindikasikan bahwa DBH tetap memiliki potensi pengaruh terhadap kemandirian fiskal, terutama dalam konteks kebijakan transfer fiskal antar-pemerintah yang bersifat kompleks dan dinamis. Pengaruh signifikan PAD terhadap kemandirian fiskal menunjukkan bahwa daerah yang mampu mengelola dan menggali potensi penerimaan asli secara optimal memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk membiayai kebutuhan belanja tanpa bergantung pada transfer pusat. PAD merupakan indikator langsung dari kekuatan fiskal internal suatu daerah, sehingga peningkatan PAD secara langsung mendorong peningkatan otonomi fiskal. Sementara itu, pengaruh DBH yang tidak signifikan secara langsung dapat dijelaskan melalui kemungkinan efek tidak langsung. Banyak daerah menggunakan DBH untuk membiayai belanja modal seperti infrastruktur dasar (jalan, pasar, sarana logistik), yang efeknya baru akan terasa dalam peningkatan ekonomi lokal dan penerimaan PAD di masa depan. Oleh karena itu, meskipun DBH tidak secara langsung meningkatkan kemandirian fiskal saat ini, dampaknya bisa bersifat jangka panjang dan mediatif melalui peningkatan kapasitas ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara penggunaan DBH dan strategi optimalisasi PAD agar tujuan kemandirian fiskal dapat tercapai secara berkelanjutan.

Tabel 8. Hasil Uji t

Variabel Independen	Koefisien (β)	t-hitung	Sig. (p-value)	Kesimpulan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0.567	3.811	0.001	Diterima
Dana Bagi Hasil (DBH)	0.213	1.761	0.089	Ditolak

Berdasarkan hasil uji t (parsial) yang disajikan pada Tabel 4.6, dapat dijelaskan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik, PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap kemandirian fiskal diterima. Artinya, semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal yang dapat dicapai. Ini menggambarkan bahwa kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatannya sendiri menjadi faktor penting

RESEARCH ARTICLE

dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Sementara itu, variabel Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,089 yang lebih besar dari 0,05. Nilai ini mengindikasikan bahwa DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal. Meskipun koefisien arah hubungannya positif, secara statistik pengaruhnya belum cukup kuat untuk dinyatakan signifikan. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh terhadap kemandirian fiskal ditolak. Hal ini dapat diartikan bahwa ketergantungan pada dana transfer dari pusat seperti DBH belum mampu mendorong peningkatan kemandirian fiskal secara nyata.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Statistik	Nilai	Interpretasi
R Square (R^2)	0.612	61,2% variasi kemandirian fiskal dijelaskan oleh variabel PAD dan DBH
Adjusted R Square	0.586	Penyesuaian untuk jumlah variabel bebas dan ukuran sampel
Standard Error of Estimate	0.082	Menunjukkan besarnya kesalahan standar dalam model

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,612 menunjukkan bahwa 61,2% variasi dalam tingkat kemandirian fiskal daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD dan DBH. Sementara itu, sebanyak 38,8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), belanja modal, serta kapasitas kelembagaan fiskal daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun PAD dan DBH merupakan komponen utama dalam analisis, masih terdapat ruang untuk eksplorasi variabel lain dalam penelitian mendatang. Oleh karena itu, studi lanjutan disarankan untuk memasukkan variabel-variabel tersebut guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai determinan kemandirian fiskal. Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,586 mengoreksi efek jumlah variabel bebas dan jumlah sampel, memberikan gambaran bahwa model tetap cukup kuat setelah penyesuaian. *Standard Error of Estimate* sebesar 0,082 menunjukkan deviasi rata-rata antara nilai prediksi dan actual masih dalam batas wajar, mendukung validitas model regresi.

Tabel 10. Tren Tahunan Rata-rata PAD, DBH, dan Kemandirian Fiskal di Kalimantan Barat (2019–2023)

Tahun	Rata-rata PAD (% dari Pendapatan Daerah)	Rata-rata DBH (% dari Pendapatan Daerah)	Rata-rata Kemandirian Fiskal
2019	19,8%	21,5%	36,2%
2020	18,3%	19,1%	33,5%
2021	20,4%	20,2%	37,0%
2022	22,1%	20,7%	39,4%
2023	23,5%	20,0%	41,8%

Tabel 10 menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mengalami tren peningkatan setiap tahun, dari 19,8% pada 2019 menjadi 23,5% pada 2023. Sebaliknya, DBH relatif fluktuatif dengan tren yang lebih stagnan. Kemandirian fiskal juga menunjukkan peningkatan yang konsisten, terutama setelah tahun 2021, seiring dengan perbaikan ekonomi pasca-pandemi dan penguatan kinerja PAD di beberapa daerah.

4.2 Pembahasan

Hipotesis 1 menyatakan bahwa pengaruh PAD terhadap Kemandirian Fiskal. Hasil analisis mendukung Hasil uji t menunjukkan bahwa PAD memiliki koefisien positif sebesar 0.567 dan signifikan pada tingkat 0.001. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan PAD akan secara signifikan meningkatkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan Teori Desentralisasi Fiskal (Oates, 1972), yang menekankan bahwa daerah yang mampu menghasilkan pendapatan sendiri memiliki kapasitas yang lebih tinggi dalam membiayai pengeluaran publik secara mandiri. Peningkatan PAD mencerminkan produktivitas fiskal daerah yang kuat, serta efektivitas dalam

RESEARCH ARTICLE

memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Sari & Setiawan (2019), Hidayat & Prasetyo (2020), serta Kristina *et al.* (2021) yang menunjukkan bahwa PAD merupakan penentu utama tingkat kemandirian fiskal daerah. Namun demikian, efektivitas PAD juga bergantung pada struktur dan kualitasnya. Daerah dengan dominasi PAD dari sektor tertentu (misal: pajak hiburan atau parkir) cenderung lebih rentan terhadap fluktuasi. Oleh karena itu, diversifikasi PAD juga perlu diperhatikan. Hipotesis 2 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Kemandirian Fiskal. Hasil menunjukkan DBH berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Hal ini tidak sesuai dengan ekspektasi awal dan bertentangan dengan beberapa studi terdahulu. Ketidaksignifikanan ini dapat dijelaskan oleh dua faktor utama. Pertama, DBH bersifat sebagai transfer vertikal yang pasif, artinya besarnya ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat berdasarkan formula tertentu, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kontrol langsung terhadap jumlah yang diterima. Kedua, besaran DBH sangat bergantung pada fluktuasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dan pajak pusat. Jika terjadi penurunan pada sektor-sektor ini, maka DBH juga menurun, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan kemandirian fiskal menjadi tidak konsisten dan tidak dapat diandalkan dalam jangka panjang. Hasil ini mendukung Teori Ketergantungan Fiskal (Bird & Smart, 2002), yang menyatakan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat justru melemahkan insentif daerah untuk menggali pendapatan asli. Daerah dengan alokasi DBH besar seperti Ketapang dan Kapuas Hulu justru tetap memiliki tingkat kemandirian fiskal sedang, menandakan bahwa DBH tidak menjamin peningkatan otonomi fiskal tanpa upaya internal penguatan PAD. Penelitian ini juga selaras dengan studi Verawaty *et al.* (2017) dan Nurhasanah & Maria (2017), yang menemukan bahwa meskipun DBH meningkatkan kapasitas fiskal, ia tidak selalu mengarah pada kemandirian fiskal karena ketergantungannya terhadap kebijakan pusat dan fluktuasi penerimaan negara. Ketergantungan yang tinggi terhadap DBH cenderung bersifat pasif, sehingga tidak mendorong inovasi fiskal daerah. Ini menguatkan teori ketergantungan fiskal (Bird & Smart, 2002) bahwa transfer pusat yang tinggi justru melemahkan inisiatif daerah dalam menggali PAD.

5. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, ditemukan bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang mampu meningkatkan PAD melalui optimalisasi potensi lokal, pajak, retribusi, dan pengelolaan aset, cenderung memiliki kapasitas fiskal yang lebih mandiri dan mampu mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Temuan ini mendukung hipotesis pertama sekaligus mengafirmasi teori desentralisasi fiskal yang menempatkan PAD sebagai indikator utama keberhasilan otonomi keuangan. Sementara itu, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel DBH memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemandirian fiskal. Artinya, meskipun DBH memberikan tambahan kapasitas pendanaan, sifatnya yang tergantung pada kebijakan pusat dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah membuat kontribusinya terhadap peningkatan kemandirian fiskal menjadi terbatas. Dengan demikian, hanya hipotesis pertama yang diterima, sementara hipotesis kedua ditolak. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa pencapaian kemandirian fiskal yang berkelanjutan memerlukan penguatan pada aspek-aspek yang dapat dikendalikan langsung oleh daerah, terutama dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan PAD. Berdasarkan hasil temuan tersebut, pemerintah daerah di Kalimantan Barat disarankan untuk melakukan diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak hanya mengandalkan sektor-sektor konvensional seperti pajak hotel dan restoran, tetapi juga menggali potensi ekonomi lokal lainnya, seperti sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan jasa berbasis digital. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur pemungut pajak daerah juga menjadi prioritas penting. Pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan intensif mengenai administrasi perpajakan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pajak, serta penguatan regulasi dan pengawasan terhadap

RESEARCH ARTICLE

kebocoran pendapatan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil temuan. Pertama, variabel yang digunakan dalam penelitian masih terbatas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga belum mencakup keseluruhan faktor yang secara potensial dapat memengaruhi tingkat kemandirian fiskal daerah. Keterbatasan ini dapat mengurangi kedalaman analisis terhadap dinamika fiskal yang kompleks di tingkat daerah. Kedua, penelitian ini tidak memasukkan aspek kualitatif seperti kualitas tata kelola keuangan, kapasitas kelembagaan, atau komitmen politik lokal yang juga dapat berkontribusi terhadap pencapaian kemandirian fiskal. Selain itu, ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada daerah di Provinsi Kalimantan Barat juga membatasi generalisasi hasil penelitian ke konteks wilayah lain yang memiliki karakteristik fiskal dan ekonomi yang berbeda. Berdasarkan keterbatasan tersebut, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan variabel dengan memasukan komponen lain seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), belanja modal serta indikator kualitas tata kelola keuangan daerah. Penambahan variabel-variabel ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan sistematis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian fiskal. Di samping itu, pendekatan campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif juga dapat dipertimbangkan untuk menangkap dimensi yang tidak tergambar dalam data statistik semata, seperti praktik manajerial dan inovasi fiskal di tingkat daerah.

6. Referensi

- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 – 2015). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30-39. <https://doi.org/10.37058/jak.v13i1.708>.
- Bird, R. M., & Smart, M. (2002). Intergovernmental fiscal transfers: International lessons for developing countries. *World development*, 30(6), 899-912.
- Ginting, A. M., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2019). Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 105-127.
- Halawa, L. L., Sukma, M., Limbong, E., & Pangestoeti, W. (2025). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Terkait Keuangan Negara. *Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi*, 2(1), 43-53.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal (Edisi Kedua).
- Jafar, R. (2024). PENGARUH PENDAPATAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN FISKAL DI PROVINSI SULAWESI SELATAN. *ICOR: Journal of Regional Economics*, 5(01), 44-59.
- Karo-Karo, R. (2022). Kajian Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.

RESEARCH ARTICLE

- Ningrum, D. S., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 24(1), 37-48.
- Oates, W. E. (1972). Fiscal Federalism. New York: Harcourt Brace Jovanovich. *Polity IV Dataset* <http://www.bsos.umd.edu/cidcm/inscr/polity>.
- Paddu, A. H. (2024). Peta Arah Desentralisasi Fiskal Di Indonesia Outlook Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah Indonesia. *Kini dan Esok*, 23.
- Pratama, A., Afiah, N. N., & Alfian, A. Does the Quality of Local Government Reporting Disclosure Get Better with Size and Age? Study in West Java Local Government, Indonesia.
- Rahmadi, I. A. (2025). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue, Kemakmuran Daerah dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).
- Rahmadina, S. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Jawa Timur Tahun Periode 2017-2021* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Sales, M. (2024). *Analisis Efektivitas PAD, Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi* (Doctoral dissertation, Fakultas Sosial Sain).
- Salsabela, A. H. (2024). Optimalisasi Desentralisasi Fiskal Upaya Peningkatan Kesejahteraan Daerah Tertinggal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 551-564.
- Sholikhah, R. (2011). Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2000-2009.
- Sianturi, A. (2014). *Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Tjoet, T. S. R. (2023). *Analisis Kausalitas Antara Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Zakiah, K. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2016-2020. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2).